



STANDARD OPERATING PROCEDURE

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
SOA BAJAWA

Nomor SOP

KP.001/73e/I/BJW.2024

Tanggal Pembuatan

15 Januari 2024

Tanggal Revisi

-

Tanggal Pengesahan

15 Januari 2024

Disahkan oleh

Kepala Kantor UPBU
SOA BAJAWA
Yudi A. Nopen
NIP. 198103052002121003

SOP PENYUSUNAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum :

Keputusan Menteri 117 Tahun 2022 Tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keterkaitan :

SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, menghambat proses permintaan Informasi Publik

Cara Mengatasi :

Memahami mekanisme penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Peralatan / Perlengkapan :

ATK dan Komputer

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID UPT membuat usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) lalu menyerahkannya pada PPID Pelaksana					Data dan Informasi	5 Hari Kerja	Usulan DIP	
2	PPID Pelaksana juga membuat Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta menerima Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dari PPID UPT - Jika sudah pernah dilakukan uji konsekuensi sebelumnya maka PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan bahwa sudah pernah dilakukan uji konsekuensi - Jika belum dilakukan uji konsekuensi maka PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi					Surat usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	5 Hari Kerja	Surat pemberitahuan sudah pernah dilakukan uji konsekuensi atau surat pengantar uji konsekuensi atau usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	
3	PPID Utama memerintahkan PPID Pelaksana untuk rapat uji konsekuensi					Surat pengantar uji konsekuensi dan usulan DIK	1 Hari Kerja	- Undangan uji konsekuensi - Usulan DIK - Disposisi - Draf awal DIK Kementerian - Berita acara uji konsekuensi	
4	PPID UPT dibantu PPID Pelaksana menyelenggarakan rapat uji konsekuensi dipimpin					- Undangan uji konsekuensi - Usulan DIK	2 Hari Kerja	- Draf revisi DIK Kementerian - Berita acara uji konsekuensi	

